



# **RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN**



**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran Tahun 2022 yang merupakan rencana kerja tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 telah tersusun. Rencana kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perubahan Anggaran Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki fungsi yang fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil yang akan dilaksanakan pada satu tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan Renja Perubahan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022, yang dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Demikian Renja Perubahan Anggaran Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang maupun pada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik pikiran maupun informasi dalam penyusunan perubahan renja tahun 2022 ini. Semoga renja perubahan anggaran ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi Pimpinan dan seluruh staf pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tahun mendatang.

Kuala Tungkal, Juni 2022



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Bab I Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2022.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	37
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	38
2.4. Review Terhadap rancangan Awal .....	40
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	51
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan .....	52
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	52
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	54
3.3. Program dan Kegiatan .....	59
Bab IV Penutup .....	80
4.1. Catatan Penting .....	80
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan .....	80
4.3. Rencana Tindak lanjut .....	81

## LAMPIRAN

Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2022.....	9
Tabel Rekapitulasi pelaksanaan Renja Per sasaran Startegis Tahun Triwulan I 2022....	28
Tabel Rekapitulasi Realisai Anggaran Per Program dan Per Bagian triwlan 1 Tahun 2022.....	35
Tabel Review Terhadap Pelaksanaan Renja Tahun 2022.....	41
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2022.....	56
Tabel 3.3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setda tahun 2022.....	61
Tabel Rumusan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah Kab. Tanjab Barat Tahun 2022.....	69

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 merupakan rencana kerja tahunan yang menjabarkan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu Rancangan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 juga tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemenintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sebagai bahan pertimbangan.

Sekretariat Daerah memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Rancangan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 berorientasi kepada pencapaian hasil. Oleh karena itu, berkenaan dengan program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu dituangkan ke dalam program dan kegiatan.

Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 didasarkan kepada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas Pembangunan Jangka Menengah yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud konsistensi antar dokumen perencanaan.

## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Rancangan Rencana Kinerja (Renja) Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tetntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 23 tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan daerah.

11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708/ Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodevikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889/Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 66);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat;

2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran antar bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah;
2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik di masa depan.
3. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas kegiatan antar bidang, antar kegiatan, antar fungsi di Sekretariat Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Kinerja.**

##### **BAB. I. Pendahuluan**

###### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

###### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

## **BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022**

Sub Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sub Bab ini memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renja, Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sub Bab ini memuat uraian mengenai: Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan Formulasi isu-isu penting

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah**

Sub Bab ini memuat uraian mengenai: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sub Bab ini memuat hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

### **BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berisi uraian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja terhadap program dan kegiatan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dan Program Kegiatan.

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Sub Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sub Bab ini memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Sub Bab ini memuat penjelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Jumlah program dan jumlah kegiatan, Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu), dan Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

## **BAB III. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2022

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun berjalan/ sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatanpun terus dilakukan seiring dilaksanakannya penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026, sehingga pada penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat daerah tahun berjalan/sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan.

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada hasil capaian target kinerja yang telah ditentukan dalam rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan secara periodik. setiap tahun dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan renja, yaitu dilakukan pada per triwulan dan akhir tahun. Hasil evaluasi ini akan dijadikan dasar dalam pencapaian target dengan tujuan untuk mempertahankan maupun memperbaiki dari kualitas pelayanan publik.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 atau triwulan I sebagai ukuran keberhasilan dan kegagalan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2022  
Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah tahun berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022(%)		unit Perangkat daerah yang bertanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		III	IV		12		13 = 6 + 12		14 + 13/5 x 100%	
1	2	3	4	5		6		7		8		11		12		13 = 6 + 12		14 + 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan serta pelayanan publik pada Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	500%	211,543,978,994	100%	21,009,131,748	100%	26,383,648,780	23.73%	3,275,056,042	0%	-	23.73%	3,275,056,042	123.73%	24,284,187,790	24.75%	11.48%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	500%	3,412,419,676	100%	79,575,500	100%	164,261,000	25.00%	40,370,000	0%	-	25.00%	40,370,000	125%	119,945,500	25.00%	4%	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah Setda	71,20 (BB)		>60,39 (B)		>62,55 (B)		0		0	0	>60,39 (B)		20.00%				
	4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Bagian Setda yang diselenggarakan	10 Dokumen	10	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100%	3.42%		
			Jumlah dokumen perencanaan setda yang disusun sesuai dengan aturan dan tepat waktu	10 Dokumen	10	79,575,500	-	164,261,000	0	40,370,000	-	0	0	0	40,370,000	10	119,945,500	100%		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	0	4 Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5.00%			

'4.01.0 1.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan tersusun berkualitas dan tepat waktu	500%	155,679,797,972	100.00 %	16,340,987,652	100.00 %	19,646,158,180	22.4 6%	2,123,597,616			0	-	22.4 6%	2,123,597,616	122.46 %	18,464,585,268	24.49 %	11.8 6%
'4.01.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	12 Bulan	145,781,978,487	12	15,311,217,652	0	18,297,088,180	0	1,817,477,616			0	-	0	1,817,477,616	12	17,128,695,268	100%	11.7 5%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	661 Org/bln		131 Org/Bl n		132 Org/Bl n		25.0 0%		25.0 0%	25.0 0%								
'4.01.0 1.2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dibayarkan honorarium	63 orang	8,395,720,000	63	924,320,000	0	1,090,920,000	0	250,220,000			0	-	0	250,220,000	63	1,174,540,000	100%	13.9 9%
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen		1 Dok		22.9 4%		22.9 4%		22.94 %									
'4.01.0 1.2.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan hasil pengujian / verifikasi keuangan OPD	2 laporan	959,575,000	2	57,325,000	0	169,250,000	0	39,250,000			0	-	0	39,250,000	2	96,575,000	100%	10%
		Jumlah dokumen laporan keuangan	2 Dok		2		0		0		0	2	100%							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen		0.00%		1		23.1 9%		23.1 9%	23.19 %	5.80%							
'4.01.0 1.2.02. 08	Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran	1 Dokumen	542,524,485	1	48,125,000	0	88,900,000	0	16,650,000			0	-	0	16,650,000	1	64,775,000	100%	12%
		Jumlah dokumen pelaporan setda	4 Dokumen		4		0		0		0	4	100%							
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 Dokumen		18.7 3%		2		18.7 3%		18.73 %	5%								
'4.01.0 1.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi dan Konsultasi yang diklaksanakan	500%	51,462,211,346	100.00 %	4,588,568,596	100.00 %	6,415,979,600	25.0 0%	1,085,813,426			0	-	25.0 0%	1,085,813,426	125.00 %	5,674,382,022	25.00 %	11%
'4.01.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah waktu rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	51,462,211,346	12	4,588,568,596	12 Bulan	6,415,979,600	0	1,085,813,426			0	-	0	1,085,813,426	12	5,674,382,022	100%	11.0 3%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan		12 Lapora n		3		3		3	6.25%								
'4.02.0 1.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Mliik Daerah	Persentase BMD terkelola dengan baik	500%	989,550,000	100.00 %	-	100%	157,250,000	16.0 7%	25,275,000			0%	-	16.0 7%	-	116.07 %	46,875,000	23.21 %	5%

	'4.02.0 1.2.03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD OPD yang dikelola	1137 BMD		1137		0		0			0	0		1137		100%		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	989,550,000	0	46,875,000	2 Lapora n	157,250,000	16.0 7%	25,275,000			-	16.0 7%	-	46,875,000	4.02%	5%	
Meningkatn ya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan serta pelayanan publik pada Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	'4.01.0 1.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat	500%	145,063,414,212	100.00 %	16,571,344,270	100.00 %	16,377,826,273	21.6 1%	3,539,684,469			0.0 0%	21.6 1%	3,539,684,469	121.61 %	20,111,028,739	24%	13.8 6%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Setda)	89,00		80,66		80,66		0		0	80,66							
			Tingkat kehadiran pegawai / ASN	500%		6,168,635,496		100.00 %		469,501,805		100%	763,326,800	100. 00%	9,887,750		3%		-	
	'4.01.0 1.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	542 stel	4,466,937,877	542	327,734,000		360,531,800	0	-			0	0	-	542	100%	327,734,000	7%
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket				5 Paket		0		0	0							
	'4.01.0 1.2.05. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Staf Ahli	3 Staf Ahli	994,697,619	3	141,767,805		330,795,000	0	9,887,750			0	0	9,887,750	3	100%	151,655,555	15.2 5%
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang di Jalankan	2 Aplikasi		2		0		0		2	100%							
			Jumlah Waktu Fasilitasi Makanan dan Minuman Staf Ahli	12 Bulan		12		0		0		12	100%							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen				3 Dok		2.99 %		2.99 %	2.99%	0.75%						
	'4.01.0 1.2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan/Pelatihan yang difasilitasi	2 Orang	707,000,000	2	-		72,000,000	0	-			0	0	-	2	100%	-	0%
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						14 ASN		0		0		0								

Bagian UMUM

Bagian Umum

	'4.01.0 1.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	60 Bulan	29,869,013,856	12	4,331,470,105	12 Bulan	4,107,033,734	3	774,600,750			0	-	3	774,600,750	15	5,106,070,855	25.00 %	17%
	'4.01.0 1.2.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	12 Bulan	2,015,463,017	12	239,638,850		287,563,865	0	147,072,750			0	-	0	147,072,750	12	386,711,600	100%	19%
	Jumlah Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor		12 Bulan					0				0		12	100%						
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket			1 Paket		51.1 4%				51.1 4%	51.14 %	12.79 %							
	'4.01.0 1.2.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK) yang Tersedia	11 Jenis/Item	15,531,266,561	11	426,005,000		497,285,257	0	177,005,000			0	-	0	-	11	426,005,000	100%	3%
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		8 Paket			2 Paket		35.5 9%				35.5 9%	35.59 %	8.90%							
	'4.01.0 1.2.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	60 Jenis/Item	2,883,518,690	60	1,664,484,177		316,773,108	0	-			0	-	0	-	60	1,664,484,177	100%	58%
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket			3 Paket		0				0	0	0%							
	'4.01.0 1.2.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik (alat dan bahan pembersih/kebersihan) kantor	12 Bulan	8,231,731,110	12	1,937,718,078		2,954,200,169	0	450,523,000			0	-	0	450,523,000	12	2,388,241,078	100%	29%
	Jumlah Waktu Ketersediaan Makanan dan Minuman Kantor		12 Bulan					0				0		12	100%						
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket			1 Paket		15.2 5%				15.2 5%	15.25 %	3.81%							



'4.01.0 1.2.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak (Blangko, Formulir, Buku, Map) dan Pengandaan yang tersedia	7 Jenis/Item	1,207,034,478	7	63,624,000	51,211,335	0	-	-	-	-	-	-	-	7	63,624,000	100%	5%
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	8 Paket		0			2 Paket										0	
'4.01.0 1.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH	500%	33,452,061,667	100.00 %	4,297,762,997	100%	2,309,744,420	6.67 %	1,585,830,999	0%	-	6.67 %	1,585,830,999	106.67 %	5,883,593,996	21.33 %	18%	
'4.01.0 1.2.07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	49 Unit	23,446,356,000	0	-	12 Unit	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0%	0%
'4.01.0 1.2.07. 02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket	1,907,929,951	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0%	0%
'4.01.0 1.2.07. 06	Pengadan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	266 Unit	8,097,775,716	0	4,297,762,997	45 Unit	2,309,744,420	3	1,585,830,999	0	-	3	1,585,830,999	3	5,883,593,996	1.13%	73%	
'4.01.0 1.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	500%	30,899,031,804	100.00 %	2,788,596,669	100%	3,284,460,675	22.8 6%	683,836,493	0%	-	22.8 6%	683,836,493	122.86 %	3,472,433,162	24.57 %	11%	
'4.01.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Pendistribusian dan Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Setda	12 Bulan	3,759,223,008	12	388,581,000	0	447,025,000	0	108,400,000	0	0	0	108,400,000	12	496,981,000	100%	13%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		0		2 Laporan		24.2 5%		0	24.2 5%	24.25 %	6%					

'4.01.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Beban Pemakaian Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet/TV Berlangganan	12 bulan	12,962,071,800	12	1,184,235,241	0	1,867,500,000	0	298,881,893	0	-	0	298,881,893	12	1,483,117,134	100%	11%
		Jumlah Waktu Penyediaan Beban Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan	12 bulan		12		0		0		0		0		12		100%	
		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan		12		0		0		0		0		12		100%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan				3 Laporan		16.00%		16.00%		16.00%		4.00%			
'4.01.0 1.2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	4,014,904,798	12	581,240,000		336,725,000	0	54,000,000		-	0.00%	54,000,000	12	635,240,000	100%	16%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan		0		2 Laporan		16.04%		16.04%		4.01%					
'4.01.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	45 Jenis/Item	10,162,832,198	45	634,540,428	0	633,210,675	0	222,554,600		-	0	222,554,600	45	857,095,028	100%	8%
		Jumlah Waktu Tersedianya Jasa Pelayanan Umum (Tenaga Kebersihan) Kantor	12 Bulan		12		0		0		0		12		100%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		0		1 Laporan		35.15%		35.15%		9%					
'4.01.0 1.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan	500%	37,497,292,263	100.00%	4,093,726,520	100%	4,845,608,750	6.93%	345,808,466	0%	-	6.93%	345,808,466	107%	4,439,534,986	21.39%	12%

Bagian Umum

'4.01.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	88 Unit	19,212,757,462	88	1,858,686,679	0	2,794,099,000	0	178,238,466	0	-	0	178,238,466	88	2,036,925,145	100%	11%
		Jumlah Waktu Jasa Pemeliharaan (Tenaga Supir) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12 Bulan		12		0		0		0		0		12		100%	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	172 Unit		0		88 Unit		6.38 %		6.38 %		6.38%		1.59%			
'4.01.0 1.2.09. 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	335 Unit	325,705,380	0	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0%	0%		
'4.01.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	12 Bulan	5,961,222,842	12	486,225,500	0	805,165,000	0	21,870,000	0	-	0	21,870,000	12	508,095,500	100%	9%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0		0		518 Unit		2.72 %		2.72 %		2.72%		0.68%			
'4.01.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	1 Gedung	11,997,606,579	1	1,748,814,341	0	1,246,344,750	0	145,700,000	0	-	0	145,700,000	1	1,894,514,341	100%	16%
		Jumlah Rumah Dinas/Jabatan yang dipelihara/Rehabilitasi	3 Bangunan		3		0		0		0		3		100%			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75 *Unit		0		15 Unit		11.6 9%		11.6 9%		11.69 %		2.92%			
4.01.0 1.01.2. 1.1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang Tersedia	500%	7,177,379,126	100%	590,286,174	100%	1,067,651,894	13.0 9%	139,720,011	13.0 9%	-	13.0 9%	139,720,011	113.09 %	730,006,185	23%	10.1 7%
4.01.0 1.01.2. 1.1.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	7,177,379,126	2	590,286,174	2	1,067,651,894	13.0 9%	139,720,011	13.0 9%	-	13.0 9%	139,720,011	213.09 %	730,006,185	53.27 %	10.1 7%

Menigkatnya kualitas pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan kelembagaan yang efektif	4.01.0 1.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase OPD Kabupaten tepat ukuran, tepat fungsi	100%	8,310,028,917	100%	317,109,256	0	755,255,018	29.9 3%	122,472,500				122,472,500	100.00 %	439,581,756	100%	5.29 %	Bagian Organisasi	
			Nilai Kematangan Perangkat Daerah	43				29				17.3 0%		0.0 0%		-		17.3 0%			
	4.01.0 1.2.13. 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah OPD yang Right Sizing	3 OPD	2,602,283,600	3	89,864,000	0	101,774,307	0	33,294,600	0	-	0	33,294,600	3	123,158,600	100%	5%		
			Jumlah Peraturan Bupati terkait kelembagaan	3 Perbup		3		0		0		0		3		100%					
			Jumlah Tersusunnya Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100%					
			Jumlah Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100%					
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	15 Dokumen		0		3 Dok		32.7 1%		32.7 1%		32.71 %		8.18%					
	4.01.0 1.2.13. 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,31	3,163,867,106	0	92,898,706	80.66	487,350,000	0.00	34,549,800	0.0 0	-	0	34,549,800	0	127,448,506	0%	4%		
			Persentase Survey Kepuasan Masyarakat	100%		100%		0		0		0.00 %		100%		100%					
			Jumlah Tersusunnya Laporan SOP	25 SOP		25		0		0		0		25		100%					
			Jumlah regulasi kebijakan ketatalaksanaan	2 Regulasi		2		0		0		0		2		100%					
			Data Pengaduan Pelayanan Publik Terpadu	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100%					
			Data Inovasi Daerah	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100%					
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			20 Laporan	4 Lapora n		7.09 %		7.09 %		27.09 %		6.77%									
4.01.0 1.2.13. 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai AKIP Kabupaten	>70,50	2,543,878,211	>53,5 0	134,346,550	>61,50	166,130,711	12.1 1%	54,628,100	0.0 0%	-	12.1 1%	54,628,100	112.11 %	188,974,650	28.03 %	7.43 %			
		Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	1 Laporan		1		0		0		1		1		2		100%				
		Jumlah Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi kabupaten	1 Laporan		1		0		0		1		1		2		100%				
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10 Dokumen		2		2 Dok		1		1		3		30%						

Meningkatkan pelayanan Kehumasan dan keprotokolanan KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah	'4.01.0 1.2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi	500%	12,359,786,592	100.00 %	650,674,300	100%	2,169,614,024	40.40 %	1,163,724,800			0%	-	40.40 %	1,163,724,800	140.40 %	1,814,399,100	28.08 %	14.68 %	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
	'4.01.0 1.2.14. 01	Fasilitasi Keprotokolanan	Frekuensi kegiatan pimpinan daerah yang dilakukan secara keprotokolanan	12 Bulan	3,431,227,207	12	0	0	276,319,800	0	64,659,800			0	0	64,659,800	12	250,179,600	100%	7%				
			Jumlah dokumen kegiatan keprotokolanan	1 Dokumen		1	0	0		0				0	1		100%							
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolanan	5 Laporan			1 Laporan	23.40 %		0				23.40 %	23.40 %		5.85%							
	'4.01.0 1.2.14. 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Frekuensi pelaksanaan peliputan kegiatan pimpinan daerah	12 Bulan	4,334,921,400	12	0	0	487,350,000	0	146,420,000			0	0	146,420,000	12	611,574,500	100%	14.11 %				
			Jumlah media jurnal/surat kabar yang dilakukan kerjasama peliputan kegiatan pimpinan daerah	90 Media		90	0	0		0				0	90		100%							
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan		0	1 Laporan	30.04 %						30.04 %	30.04 %		7.51%							
	'4.01.0 1.2.14. 03	Pendokumentasi Tugas Pimpinan	Frekuensi jasa penayangan dokumentasi cetak dan digital kegiatan pimpinan	12 Bulan	4,593,637,985	12	0	0	1,405,944,224	0	952,645,000			0	0	952,645,000	12	2,557,444,600	100%	55.67 %				
			Frekuensi sewa billboard area bandara	16 Kali		16	0	0		0				0	16		100%							
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan		0	1 Laporan	67.76 %						67.76 %	67.76 %		16.94 %							
	Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan	'4.01.0 2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase keterisian data IKK LPPD	500%	109,065,554,685	100.00 %	9,119,092,659	100.00 %	13,762,324,877	21.65 %	889,670,211			0%	-	21.65 %	889,670,211	122%	10,008,762,870	24%		9.18 %	Bagian Tata Pemerintahan
		'4.01.0 2.2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Skorr LPPD	3<ST<4	9,038,861,695	3<ST<4	492,754,235	3<ST<4	672,161,375		84,243,100			-		84,243,100		576,997,335		6.38 %			

Otonomi Daerah	'4.01.0 2.2.01. 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Laporan	3,423,679,780	1	302,578,200	0	350,929,880	0	60,154,800	0	-	0	60,154,800	1	362,733,000	100%	11%
			Jumlah Laporan Standar Pelayanan Minimal	1 Laporan		1		0		0		0		0		1		100%	
			Jumlah Pelaksanaan Event dalam rangka peningkatan nilai kebangsaan	10 Event (HUT RI & Hari Jadi Kab.		2		0		0		0		0		2		100%	
			Cakupan wilayah monitoring kesiapan tahapan Pemilu, Pilkada dan Pilpres	13 Kecamatan		13		0		0		0		0		13		100%	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	17 Dokumen		0		4 Dok		2		2		2		11.76 %			
	'4.01.0 2.2.01. 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Laporan Pembuatan nama Rupabumi	1 Laporan	2,928,211,500	1	94,901,400	0	159,261,300	0	7,791,000	0	-	0	7,791,000	1	102,692,400	100%	4%
			Jumlah Tanda Batas Kabupaten	4 Tanda		4		0		0		0		4		100%			
			Jumlah tanda batas Kecamatan	8 Tanda		8		0		0		0		8		100%			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen		0		1 Dok		4.89 %		4.89 %		4.89%		1.22%			
	'4.01.0 2.2.01. 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah kecamatan yang dilakukan penilaian camat teladan	13 Kecamatan	2,686,970,415	13	95,274,635	0	161,970,195	0	16,297,300	0	-	0	16,297,300	13	111,571,935	100%	4%
			Jumlah Rapat Koordinasi camat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Kali Rakor		1		0		0		0		1		100%			
			Jumlah laporan pengawsan pelaksanaan PATEN	1 Laporan		1		0		0		0		1		100%			

			Jumlah monitoring pelaksanaan perencanaan, penganggaran perbendaharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yg baik tingkat kelurahan	2 Laporan		2		0		0				0	0		2		100%	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12 Dokumen		0		3 Dok		10.06%					10.06%		10.06%		2.52%	
Meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesejahteraan rakyat	'4.01.0 2.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	500%	86,137,539,988	100%	7,186,325,455	100%	11,711,750,431	2.65%	438,778,856	0%	-	2.65%	438,778,856	102.65%	7,625,104,311	20.53%	8.85%	Bagian Kesejahteraan Masyarakat
			Capaian Prestasi MTQ tingkat Provinsi	3 Besar		3 Besar		3 Besar		0		0		0%		0%		300%		
	'4.01.0 2.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah cabang lomba musyabahah tilawatil qur'an (MTQ) tingkat provinsi yang diikuti	26 Cabang Lomba	59,706,835,340	26	6,515,806,068	0	7,883,511,528	0	417,508,856	0	-	0	417,508,856	26	6,933,314,924	100%	11.61%	
			Jumlah pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Syiar Nilai-Nilai Keagamaan	9 Kali Peringatan Hari Besar		9		0		0		0		9		100%				
			Jumlah pembinaan pengembangan tilawatil Qur'an yang dilaksanakan	3 Kali Pembinaan		3		0		0		0		3		100%				
			Jumlah Tahapan Pelaksanaan Training Centre (TC) MTQ	5 Kali Tahapan		5		0		0		0		5		100%				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	32 Dokumen		0		8 Dokumen		5.30%				5.30%		5.30%		1.32%		
	'4.01.0 2.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga yang difasilitasi, diverifikasi, dan dimonitoring, dievaluasi serta diberi rekomendasi terkait permohonan hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat sosial	2 Lembaga / Badan	22,458,429,200	2	652,300,487	0	3,519,701,003	0	14,375,000	0	0	0	14,375,000	2	666,675,487	100%	2.97%	

			Jumlah pembinaan Da'i Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	134 Da'i Desa/Kel		134		0	0			0	0	134	100%			
			Jumlah guru minggu yang diberikan intensif pembinaan	200 Orang		200		0	0			0	0	200	100%			
			Jumlah guru agama, imam, mudim dan guru ngaji, khatib dan bilal yang diberi pembinaan	3545 Orang		3545		0	0			0	0	3545	100%			
			Jumlah pelaksanaan festival anak sholeh tingkat kabupaten dan tingkat provinsi	2 Kali		2		0	0			0	0	2	100%			
			Jumlah fasilitas pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji dan pengunjung TKHD	2 kali fasilitas		2		0	0			0	0	2	100%			
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	36 Dokumen		0		9 Dokumen	0.41 %			0.41 %	0.41%		0.10%			
4.01.0 2.2.02. 03	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi serta pertemuan forum tim pembina UKS tingkat kabupaten	2 Kali Rapat		2		0	0			0	0	2	100%			
			Jumlah penyelesaian proses pencatatan pernikahan bagi masyarakat	653 pasang	3,972,275,448	653	18,218,900	308,537,900	0	6,895,000		-	0	6,895,000	653	25,113,900	100%	0.63 %
			Jumlah pelaksanaan kegiatan amaliyah ramadhan dua hari raya di 13 kecamatan	5 Kali		5		0	0				0	0	5	100%		



			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	16 Dokumen		0		4 Dokumen		2.23 %					2.23 %		2.23%		0.56%			
<b>Meningkatnya penataan produk hukum daerah</b>	'4.01.0 2.2.03	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase Produk Hukum Daerah yang dindangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</b>	100%	8,606,797,269	100.00 %	990,564,269	100%	749,813,294	11.5 3%	85,623,355			0%	-	11.5 3%	85,623,355	111.53 %	1,076,187,624	27.88 %	12.5 0%	Bagian Hukum
	'4.01.0 2.2.03. 01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Perda yang diundangkan	12 Perda	3,318,814,271	12	488,814,271	0	325,876,460	0	40,458,660			0	-	0	40,458,660	12	529,272,931	100%	15.9 5%	
			Jumlah Perbup yang diundangkan	50 Perbup		50		0		0		0	0	50	100%							
			Jumlah SK yang diterbitkan	1000 SK		1000		0		0		0	0	1000	100%							
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	16 Dokumen		0		4 Dok		12.4 2%		12.4 2%	12.42 %	3.10%								
	'4.01.0 2.2.03. 02	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah perkara yang ditangani	3 Perkara	2,612,838,000	3	226,605,000	0	276,398,795	0	26,708,595			0	-	0	26,708,595	3	253,313,595	100%	9.69 %	
			Jumlah Laporan Aksi HAM	4 Lap. Aksi HAM		4		0		0		0	4	100%								
			Jumlah Laporan Kadarkum	1 Laporan Kadarkum		1		0		0		0	1	100%								
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 Kasus		0		2 Kasus		9.66 %		9.66 %	2.42%									
	'4.01.0 2.2.03. 03	Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Koordinasi dan konsultasi penetapan raperda (Harmonisasi)	4 Kali	2,675,144,998	4	275,144,998	0	147,538,039	0	18,456,100			0	-	0	18,456,100	4	293,601,098	100%	10.9 8%	
			Jumlah Laporan SJDH	1 Laporan SJDH		1		0		0		0	1	100%								
			Jumlah perda dan himpunan perda Desa/Kel. Yang mendapatkan penyuluhan hukum	600 Buku Perda 12 Desa/Kel		0		0		0		0	600 Buku 12 Desa/ Kel	100%								
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	20 Dokumen		0		5 Dok		12.5 1%		12.5 1%	3.13%									

Meningkatkan Kerja Sama antar Daerah / Lembaga / Perseorangan Dalam Negeri & Luar Negeri	'4.01.0 2.2.04	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang terfasilitasi	500%	5,282,355,733	100.00 %	449,448,700	100%	628,599,777	40.00 %	281,024,900			0%	-	40.00 %	281,024,900	140.00 %	730,473,600	28.00 %	13.83 %	Bagian Kerjasama
	4.01.0 2.2.04.01	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen Kerjasama lembaga / perorangan dalam negeri yang difasilitasi	67 Dok	2,305,784,130	67	259,234,300	0	274,973,399	0	147,874,000			0	-	0	147,874,000	67	147,874,000	100.00 %	6.41 %	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen		0		3 Dokumen		1		1	1	8.33%								
	'4.01.0 2.2.04.02	Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah dokumen Kerjasama lembaga / perorangan luar negeri yang difasilitasi	3 Dok	1,846,232,203	3	105,644,700	0	206,088,339	0	63,913,000			0	-	0	63,913,000	3	169,557,700	100%	9.18 %	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	10 Dokumen		0		2 Dok		1		1	10%									
	4.01.0 2.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi kerjasama yang difasilitasi	70 Dokumen	1,130,339,400	70	84,569,700	0	147,538,039	0	69,237,900			0	-	0	69,237,900	70	153,807,600	100%	13.61 %	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	25 Laporan	0		5 Laporan		2		2		2	8.00%									
Meningkatkan administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah	'4.01.0 3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang dilaksanakan	500%	170,735,639,272		8,482,744,398		5,561,535,000	33.00 %	2,295,922,500			0.00 %	-	33.00 %	2,295,922,500	126,93 %	10,778,666,898	6%		Bagian Perekonomian
	'4.01.0 3.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi yang dilaksanakan	500%	154,652,477,298	93,94 %	7,219,877,298	100%	4,237,291,400	33.00 %	2,058,035,000			0.00 %	-	33.00 %	2,058,035,000	126,93 %	9,277,912,298	25,39	6.00 %	
	'4.01.0 3.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang diberikan penyertaan modal (PT.BPR Tanggo Rajo, PT Tanjab Sakti, BPD)	4 BUMD	151,663,436,500	3	7,110,951,500	0	4,083,888,800	0	2,020,150,000			0	-	0	2,020,150,000	3	9,131,101,500	100%	6.02 %	
		Jumlah BUMD yang diberikan Subsidi (PDAM Tirta Pengabuan)	1 BUMD	1		0		0		0		1	100%									
		Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD)	1 laporan	1		0		0		0		1	100%									

			Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BUMD dan BLUD	4 kali		4		0	0			0	0		4		100%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	10 Dokumen		0		2 Dokumen	49.47%			49.47%		49.47%		12.37%					
	'4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah monitoring dan evaluasi Pengendalian dan distribusi perekonomian daerah	4 kali	1,492,357,848	4	49,367,848	4 kali	0	83,888,800	20,190,000	0	-	0	20,190,000	4	69,557,848	100%	4.66%		
			Jumlah laporan sembako	12 Laporan		12		12 Laporan	0			0		12		100%					
			Jumlah laporan TPID	4 Laporan		4		4 Laporan	0			0		4		100%					
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	10 Laporan		0		2 Laporan	24.07%			24.07%		6.02%							
	'4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah laporan KUPEM	12 laporan	1,496,682,950	12	59,557,950	0	69,513,800	17,695,000	0	-	0	17,695,000	12	17,695,000	100%	4.00%			
			Jumlah laporan Pupuk	4 laporan		4		0			0		4		100%						
			Jumlah monitoring dan pembinaan KUPEM	4 kali		4		0			0		4		100%						
			Jumlah monitoring penyaluran pupuk dan pestisida tepat sasaran	4 kali		4		0			0		4		100%						
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	10 Dokumen		0		2 Dokumen			25.46%		25.46%		6.36%						
	Meningkatnya Akses Informasi Pembangunan Daerah	'4.01.03.2.02	Kegiatan Administrasi Pembangunan	Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	500%	3,816,095,900	75.00%	252,818,400	100%	301,438,400	52.33%	73,040,000	0%	-	52.33%	73,040,000	52%	325,858,400	10%	9%	Bagian ADP

	'4.01.0 3.2.02. 01	Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Jumlah dokumen data pembangunan Kab. Tanjung Barat	1 Dokumen	1,650,625,000	1	107,175,000	1	121,935,000	0	29,040,000	0	-	0	29,040,000	1	136,215,000	100%	8.25%
			Frekuensi rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan di Kab. Tanjung Barat	12 bulan		12		3		0		0		0		12		100%	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5 Dokumen		1				1				1		2		40.00%	
	'4.01.0 3.2.02. 02	Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pelaporan hasil monitoring	4 kali	952,078,400	3	15,343,400	0	28,740,000	0	9,800,000	0	-	0	9,800,000	3	25,143,400	100%	2.64%
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	5 Laporan		0		1 Laporan		34.10%		34.10%		34.10%		8.52%			
	'4.01.0 3.2.02. 03	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah LPPK dan Rekap Program OPD	12 Laporan	1,213,392,500	12	130,300,000	0	150,763,400	0	34,200,000	0	-	0	34,200,000	12	164,500,000	100%	13.56%
			Jumlah pelaporan laporan tepra sismontepra	12 Laporan		12		0		0		0		12		100%			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan		0		1 Laporan		22.68%		22.68%		22.68%		5.67%			
	Meningkatkan Akses Informasi Pembangunan Daerah	'4.01.0 3.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas	500%	8,073,670,874	100.00%	427,620,000	100%	584,046,500	10.01%	75,600,000	0%	-	10.01%	75,600,000	110.01%	503,220,000	22.00%
'4.01.0 3.2.03. 01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang ditender	150 Paket	3,718,970,000	150	137,400,000	0	195,500,000	0	41,600,000	0	-	0	41,600,000	150	179,000,000	100%	4.81%
			Jumlah paket lelang yang dilaksanakan tepat waktu dan tuntas	150 Paket		150		0		0		0		150		100%			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	620 Dokumen		0	150 Dokumen	21.28%	21.28%	21.28%	21.28%	21.28%	5.32%						

Bagian PBJ

'4.01.0 3.2.03. 02	'Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah OPD yang menyampaikan RUP tepat Waktu	44	2,554,800,000	44	290,220,000	0	388,546,500	0	34,000,000	0	-	0	34,000,000	44	324,220,000	100%	12.69%		
		Jumlah pemeliharaan Co. Location	1		1		0		0		0		1		100%					
		Jumlah server yang dilakukan Pengecekan dan servis berkala	2		2		0		0		0		2		100%					
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	176 Dokumen				44 Dok		8.75 %				8.75 %		8.75%		2.19%			
'4.01.0 3.2.03. 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta sosialisasi	84 Peserta	1,799,900,874	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0.00 %		
		Jumlah peserta ujian sertifikasi PPBJ tingkat dasar	84 Peserta		0		0		0		0		0		0%					
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	320 Orang		0		80 Org		0.00 %		0		0%							
Meningkatkan koordinasi dan Pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif	'4.01.0 3.2.04	Kegiatan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif	500%	4,193,395,200	100%	582,428,700	80%	438,758,700	24.51%	89,247,500	0%	-	24.51%	89,247,500	124.51 %	671,676,200	25%	16.02%	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan monitoring bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, Kehutanan, dan Kelautan dan Perikanan	13 kali	13	0	0	0	0	0	0	13	100%						
				Jumlah Dokumen Laporan evaluasi	1 Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	1	100%						
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	0	1 Dokumen	38.24%		38.24%								9.56%			

Bagian SDA

4.01.0 3.2.04. 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring bidang Pertambangan dan lingkungan hidup	5 kali	1,607,758,100	5	455,556,600	5 kali	252,663,700	0	30,700,000			0	-	0	30,700,000	5	486,256,600	100%	30.2 4%
		Jumlah Laporan evaluasi	1 Laporan		1		0		0				0		1		100%			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian							12.1 5%						12.1 5%		12.15 %		3.04%	
4.01.0 3.2.04. 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring bidang Energi dan Air	5 kali	1,183,017,500	5	60,747,500	0	83,520,000	0	19,322,500			0	-	0	19,322,500	5	80,070,000	100%	6.77 %
		Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi	1 Dokumen		1		0		0				0		100.00 %		100%			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen		0		1 Dokumen		23.1 4%						23.1 4%		23.14 %		5.78%	
													22.3 1%							
													Baik							

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, evaluasi pelaksanaan renja Triwulan I tahun 2022 diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjalan pada umumnya berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan tingkat realisasi kinerja yang dituangkan dalam rencana kerja perangkat daerah triwulan I tahun 2022 dapat terealisasi dengan rata-rata 22,31 % dengan predikat Baik.

Berikut pengukuran kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat triwulan I tahun 2022 didasarkan pada per sasaran strategis dengan capaian sebagaimana tabel berikut:

**Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022**  
**Per sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Tujuan Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja S.d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Penanggung Jawab
1. Meningkatkan Kualitas tatakelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggungjawab	1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan serta pelayanan publik pada Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	- Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	100%	23.73%	23.73%	Bag. Renkeu
		- Nilai/Katagori SAKIP Perangkat Daerah	>60,39 (B)	0	0	
		- Cakupan pelayanan administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat	100%	21.61%	21.61%	Bagian Umum
		- Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH	100%	6,67%	6,67%	
	1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan kelembagaan yang efektif	- Nilai Kematangan Perangkat Daerah	29	17.30%	17.30%	Bag. Organisasi
		- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	0	0	
		- Nilai AKIP Kabupaten	>61, 50 (B)	CC	53	
1.3. Meningkatkan pelayanan Kehumasan dan keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah	- Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi	100%	40,40%	40,40%	Bag. Protokoler	



2. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah daerah	2.1 Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah	- Persentase keterisian data IKK LPPD	100%	21,65%	21,65%	Bag. Tapem
		- Skor LPPD	3<ST<4	0	0	
	2.2 Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesejahteraan rakyat	- Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100%	2,65%	2,65%	Bag. Kesra
	2.3 Meningkatkan penataan produk hukum daerah	- Persentase Produk Hukum Daerah yang Di undangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	100%	11,53%	11,53%	Bag. Hukum
	2.4 Meningkatkan Kerja Sama antar Daerah / Lembaga / Perseorangan Dalam Negeri & Luar Negeri	- Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang Terfasilitasi	100%	40,00%	40,00%	Bag. Kerjasama
	2.5 Meningkatkan administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah	- Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang di laksanakan	100%	33.00%	33.00%	Bag. Perekonomian
	2.6 Meningkatkan Akses Informasi Pembangunan Daerah	- Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	100%	52,33%	52,33%	Bag. ADP
		- Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas dan tepat waktu	100%	10,01%	10,01%	Bag. PBJ
2.7 Meningkatkan koordinasi dan Pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif	- Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif	80%	24,51%	24,51%	Bag. SDA	

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 per sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan **“Meningkatkan Kualitas tatakelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggungjawab”** didukung oleh 3 (Tiga) sasaran Strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan serta pelayanan publik pada Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung yang terdiri atas 4 (empat) indikator pengukuran kinerja dengan masing-masing capaian kinerja sebagai berikut :
  - a. Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu, capaian kinerja 23,73 persen dari target 25,00 persen pada target kinerja triwulan I Tahun 2022, capaian kinerja akan dioptimalkan pada triwulan berikutnya
  - b. Nilai/Katagori SAKIP Perangkat Daerah belum dapat diukur karena ditentukan oleh inspektroat sekitar triwulan IV Tahun 2022.
  - c. Cakupan pelayanan administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat, capaian kinerja 21,61 persen, target kinerja kinerja akan dioptimalkan pada triwulan berikutnya.
  - d. Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH, capaian kinerja 6,67 Persen, capaian kinerja sangat rendah diakibatkan karena scedul pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada triwulan II dan III tahun 2022
2. Sasaran Menigkatnya kualitas pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan kelembagaan yang efektif, terdiri atas 3 indikator kinerja yaitu :
  - a. Nilai kematangan Perangkat Daerah dengan Target kinerja 29 dengan persentase capaian kinerja samapai dengan triwulan I tahun 2022 sebesar 17,30 Persen.
  - b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), belum dapat diukur capaian kinerjanya.
  - c. Nilai AKIP Kabupaten belum dapat diukur capaian kinerjanya pada triwulan I tahun 2022 dan akan optimalkan pencapaian kinerja pada triwulan berikutnya.
3. Sasaran Meningkatkan pelayanan Kehumasan dan keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi, capaian kinerja 40,40 persen, capaian kinerja sangat tinggi dari target 25 persen triwulan I tahun 2022.

Tujuan **“Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah daerah”** didukung 7 (tujuh) sasaran strategis dengan indikaktor kinerja sebanyak 8 (delapan) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah dibagi atas 2 (dua) indikator Kinerja yaitu :
  - a. Persentase keterisian data IKK LPPD, target kinerja tahun 2022 adalah 100 persen capaian kinerja sampai dengan triwulan I adalah 21,65 persen dengan katagori baik.
  - b. Skor LPPD, dengan target  $3 < ST < 4$  katagori (sangat tinggi) belum tergambar realisasinya karena menunggu penilaian dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Sasaran Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesejahteraan rakyat dengan indikator kinerja Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan, capaian kinerja 2,65 persen katogori sanagat buruk, akan diperbaiki dan dioptimalkan capaian kinerja pada triwuln berikutnya.
3. Sasaran Meningkatnya penataan produk hukum daerah, indikator kinerja Persentase Produk Hukum Daerah yang di undangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, target kinerja tercapai 11,53 persen pada triwulan I dengan katagori sangat kurang dan akan dioptimalkna capaian kinerjanya pada triwulan selanjutnya.
4. Sasaran Meningkatnya Kerja Sama antar Daerah / Lembaga / Perseorangan Dalam Negeri & Luar Negeri, indikator kinerja Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang Terfasilitasi tercapai 40,00 persen dengan katagori sangat baik.
5. Sasaran Meningkatnya administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah, indikator kinerja Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang di laksanakan, target kinerja tercapai 33,00 persen, tingkat capaian kinerja termasuk tinggi pada triwulan I tahun 2022 dan akan dioptimalkan pada triwulan berikutnya.
6. Sasaran Meningkatnya Akses Informasi Pembangunan Daerah didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :
  - a. Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah, target 100 persen tahun 2022 dan capaian target kinerja sebesar 52,33 persen pada triwulan I tahun 2022, kataori sangat tinggi
  - b. Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas dan tepat waktu, realisasi target capaian kinerja sebesar 10,01 persen pada triwulan I tahun 2022, capaian kinerja masih sangat rendah dan akan dioptimalkan pada triwulan berikutnya.

7. Sasaran Meningkatnya koordinasi dan Pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif, indikator kinerja Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif, target tercapai 100 persen, triwulan I tahun 2022 capaian kinerja sebesar 24,51 persen dan akan dioptimalkan capaian kinerjanya pada triwulan berikutnya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada triwulan I tahun 2022 berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan hampir semua indikator kinerja sasaran sebagai tolak ukur pencapaian target indikator kinerja tercapai dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 22,32 persen pada triwulan I tahun 2022

Sedangkan secara program dan pertanggungjawaban per bagaian, realisasi keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Program dan Per Bagian Triwulan I Tahun 2022  
Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Anggaran dan Realisasi Anggaran Progam Tahun 2022			Sisa Pagu Anggaran dan Efesinsi Anggaran		Bagian yang Bertanggung jawab
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anngaran (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	Sisa Pagu Anggaran (Rp)	% Sisa Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	27,451,300,674.00	3,414,776,053.00	12.44%	24,036,524,621.00	87.56%	Bagian Renkeu
		15,310,174,379.00	3,399,964,458.00	22.21%	11,910,209,921.00	77.79%	Bagian Umum
		466,097,178.00	122,472,500.00	26.28%	343,624,678.00	73.72%	Bagian Organisasi
		2,169,614,024.00	1,163,724,800.00	53.64%	1,005,889,224.00	46.36%	Bagian Protokoler
	<b>Jumlah</b>	<b>45,397,186,255.00</b>	<b>8,100,937,811.00</b>	<b>17.84%</b>	<b>37,296,248,444.00</b>	<b>82.16%</b>	
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	672,161,375.00	84,243,100.00	12.53%	587,918,275.00	87.47%	Bagian Tapem
		11,711,750,431.00	438,778,856.00	3.75%	11,272,971,575.00	96.25%	Bagian Kesra
		859,301,175.00	85,623,355.00	9.96%	773,677,820.00	90.04%	Bagian Hukum
		628,599,777.00	281,024,900.00	44.71%	347,574,877.00	55.29%	Bagian Kerjasama
	<b>Jumlah</b>	<b>13,871,812,758.00</b>	<b>889,670,211.00</b>	<b>6.41%</b>	<b>12,982,142,547.00</b>	<b>93.59%</b>	

4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	4,237,291,400.00	2,058,035,000.00	48.57%	2,179,256,400.00	51.43%	Bagian Perekonomian
		301,438,400.00	73,040,000.00	24.23%	228,398,400.00	75.77%	Bagian ADP
		584,046,500.00	70,850,000.00	12.13%	513,196,500.00	87.87%	Bagian PBJ
		438,758,700.00	98,650,000.00	22.48%	340,108,700.00	77.52%	Bagian SDA
	<b>Jumlah</b>	<b>5,561,535,000.00</b>	<b>2,300,575,000.00</b>	<b>41.37%</b>	<b>3,260,960,000.00</b>	<b>58.63%</b>	
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>64,830,534,013.00</b>	<b>2,470,075,000.00</b>	<b>3.81%</b>	<b>62,360,459,013.00</b>	<b>96.19%</b>	

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 3 (Tiga) Program dengan total anggaran sebesar Rp. **64,830,534,013,-** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **2,470,075,000,-** atau **3.81%** dan sisa pagu anggaran sebesar Rp. **62,360,459,013,-** atau **96.19%**

Adapun 3 (Tiga) program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. **45,397,186,255,-** atau 70,02 % dari total anggran, dan realisasi anggaran triwulan I tahun 2022 sebesar Rp. **8,100,937,811,-** atau 17,84 % dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp **37,296,248,444,-** atau 82,16 % dan akan dioptimalkan pada triwulan selanjutnya, program ini merupakan program non urusan yang dilaksanakan oleh 4 (empat) bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu : 1) Bagian Umum, 2) Bagian Perencanaan dan Keuangan, 3) Bagian Organisasi dan 4) Bagian Protokoler dan KOMunikasi Pimpinan.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. **13,871,812,758,-** atau 21,40% dari total anggaran, realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2022 sebesar Rp. **889,670,211,-** atau 6,42% dan sisa pagu anggaran sampai dengan triwulan I 2022 sebesar Rp. **12,982,142,547,-** atau 93.59% dan akan dioptimalkan pada teriwulan berikutnya. Program ini merupakan program urusan sekretariat yang dilaksanakan oleh 4 (empat) bagian dil Sekretariat Daerah Kabuipaten Tanjung Jabung Barat yaitu : 1) Bagian Tata Pemerintahan, 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, 3) Bagian Hukum dan 4) Bagian Kerjasama.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan, jumlah anggaran sebesar Rp. **5,561,535,000,-** atau 8,58% dari total anggaran, realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2022 sebesar Rp. **2,300,575,000,-** atau 41,37% dan sisa pagu anggaran sampai dengan triwulan I 2022 sebesar Rp. **3,260,960,000,-** atau 58.63% dan akan dioptimalkan pada triwulan berikutnya. Program ini juga dilaksanakan oleh 4 (empat) bagian di Sekretariat Daerah Kabuipaten Tanjung Jabung Barat yaitu : 1) Bagian Perekonomian, 2) Bagian Administrsi Pembangunan, 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan 4) Bagian Sumber Daya Alam.

Pelaksanaan Renja pada tahun 2021, dari semua indikator kinerja kegiatan semaksimal mungkin untuk dapat dicapai, hal ini berkaitan dengan dana dan jenis kegiatan yang dapat dikerjakan dalam tahun bersangkutan. Indikator kinerja kegiatan hanya dapat diukur bila dalam tahun tersebut terdapat kegiatan atau hal-hal lain yang menimbulkan pencapaian indikator kinerja kegiatan. Selain itu untuk dapat diukur, target indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai harus ditetapkan terlebih dahulu, dan dimasukkan ke dalam rencana kinerja. Hasil pengukuran indikator kinerja kegiatan akan menggambarkan kegagalan atau keberhasilan suatu Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja kegiatan yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja kegiatan tahun 2021 disusun atau diperoleh berdasarkan output dan outcome dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam tahun bersangkutan.

Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian indikator output untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 telah dilakukan pula efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya telah dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Evaluasi dimaksud dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, tidak saja terhadap penyebab terjadinya gap akan tetapi juga pada strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun 2021 merupakan gambaran dari Penentuan Renja pada tahun 2023 serta pencapaian Renstra dari perangkat daerah itu sendiri. Ada beberapa indikator yang tidak termuat dalam anggaran tahun 2021, maka Sekretariat Daerah melakukan evaluasi terhadap Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian target dan indikator pada tahun 2023.



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, sesuai dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis standar kebutuhan pelayanan sendiri dirumuskan indikator untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Dengan rumusan Rencana Strategis Sekretariat Daerah diharapkan dapat dijadikan landasan dalam menjawab permasalahan yang dihadapi sehingga dapat diminimalisir. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kesenjangan berkaitan kondisi ideal organisasi Sekretariat Daerah yang diharapkan dengan kendala yang dinilai saat ini belum terpenuhi dapat diproyeksikan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Rumusan kebijakan yang difasilitasi penyusunannya oleh Sekretariat Daerah memenuhi kaidah prosedur dan mekanisme yang tepat serta mengandung aspek-aspek regulasi yang jelas, pasti dan adil serta dapat dilaksanakan melalui koordinasi yang sinergis antara unit-unit kerja pemerintah daerah secara efisien dan efektif.
2. Tersedianya kerangka gerak berupa pedoman yang terstandarisasi dalam rangka menunjang tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang bersifat regulasi (regulation), pelayanan (service) dan pemberdayaan (empowering) dengan ditunjang oleh pelayanan administrasi pemerintahan yang baik.
3. Pelaksanaan kewenangan, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dilaksanakan secara efektif dengan adanya proses penataan organisasi pemerintahan yang lebih proporsional, efektif dan efisien sesuai kebutuhan secara obyektif.
4. Kinerja aparatur pemerintah daerah mengarah pada profesionalitas diberbagai bidang yang terlihat dan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja akan lebih optimal dan berorientasi pada pencapaian tujuan.
5. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat secara esensial menunjang pada implementasi pelaksanaan otonomi daerah dengan membuka ruang partisipasi masyarakat yang dilandasi oleh budaya budaya kerja yang tinggi.

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada tingkat implementasi program pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel
2. Tata kelola administrasi pertanahan belum optimal
3. Penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan yang di atasnya
4. Kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap hukum masih perlu ditingkatkan
5. Pelaksanaan pekerjaan yang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
6. Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa yang dinamis
7. Kebutuhan data dan informasi perekonomian dan pembinaan potensi daerah yang terbaru
8. Keterbatasan sumber daya (modal, SDM) dalam pelaksanaan pembangunan daerah
9. Belum optimalnya penyerapan PAD
10. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan
11. Kelembagaan yang belum efektif dan efisien
12. Penyelenggaraan pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan Staf Ahli Bupati
13. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah
14. Penyelenggaraan yang harus sesuai dengan standar keprotokolan

Permasalahan teknis operasional kegiatan yang dapat diidentifikasi dan pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

1. Perlunya dokumen perencanaan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya
2. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah

3. Batas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengari kabupaten lain sekitarnya masih belum jelas sehingga berpengaruh pada administrasi masyarakat
4. Pelayanan masyarakat di bidang pertanahan perlu dijamin oleh pemerintah
5. Adanya peraturan perundang-undangan di daerah yang pengaturannya tumpang tindih dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya
6. Belum adanya pemahaman yang sama terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa
7. Data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi daerah masih belum optimal
8. Belum semua perangkat daerah memahami mekanisme kerjasama daerah
9. Sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat kurang optimal
10. Adanya kesenjangan antara kebutuhari dan ketersediaan SDM
  
11. Perlu dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati
12. Pengelolaan aset yang belum optimal
13. Belum optimalnya standar keprotokolan dalam acara resmi di seluruh perangkat daerah
14. Pelaksanaan acara kedinasan yang sesuai dengan standar keprotokolan belum optimal

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman tugas dan fungsi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya.

#### **2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Tahun 2022**

Review terhadap Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 melalui rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran anggaran yang dibutuhkan, Renja terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:

**Reviu Terhadap Pelaksanaan Renja Tahun 2022**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program, Kegiatan, Subkegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022 sebelum perubahan				Hasil Analisis Rencana Kerja Tahun 2022 setelah perubahan					Penanggung jawab
		Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp).	Bertambah / Berkurang (%)	
1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	Kab. Tanjab Barat	100%	26,383,648,780	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	100%	28,383,648,780	2,000,000,000	7.58%	Bagian Renken
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	Kab. Tanjab Barat	100%	164,261,000	Persentase dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	100%	164,261,000	-	0.00%	
		Nilai AKIP Perangkat Daerah Setda	Kab. Tanjab Barat	62,55 (B)		Nilai AKIP Perangkat Daerah Setda	62,55 (B)				
'4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Bagian Setda yang diselenggarakan	Kab. Tanjab Barat	10 Dokumen	164,261,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	164,261,000	-	0.00%	
		Jumlah dokumen perencanaan setda yang disusun sesuai dengan aturan dan tepat waktu		10 Dokumen							
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan tersusun berkualitas dan tepat waktu	Kab. Tanjab Barat	100%	19,646,158,180	Persentase dokumen keuangan tersusun berkualitas dan tepat waktu	100%	19,646,158,180	-	0.00%	
'4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	18,297,088,180	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang/Bulan	18,297,088,180	-	0.00%	
'4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dibayarkan honorarium	Kab. Tanjab Barat	63 Orang	1,090,920,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,090,920,000	-	0.00%	
'4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan hasil pengujian / verifikasi keuangan OPD	Kab. Tanjab Barat	2 laporan	169,250,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	169,250,000	-	0.00%	
		Jumlah dokumen laporan keuangan		2 Dokumen							

'4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	88,900,000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	88,900,000	-	0.00%
		Jumlah dokumen pelaporan setda		4 Dokumen						
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Konsultasi yang diklaksanakan</b>		<b>100%</b>	<b>6,415,979,600</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Konsultasi yang diklaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>8,415,979,600</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>31.17%</b>
'4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah waktu rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	6,415,979,600	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8,415,979,600	2,000,000,000	31.17%
4.01.01.2.03	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>Persentase BMD terkelola dengan baik</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>157,250,000</b>	<b>Persentase BMD terkelola dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>157,250,000</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD OPD yang terkelola	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	1137 BMD	157,250,000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	157,250,000	-	0.00%
<b>4.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>16,377,826,273</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>28,124,444,766</b>	<b>11,746,618,493</b>	
		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Setda)</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>80,70</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Setda)</b>	<b>80,70</b>			
4.01.01.2.05	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat kehadiran pegawai / ASN</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>763,326,800</b>	<b>Tingkat kehadiran pegawai / ASN</b>	<b>100%</b>	<b>763,326,800</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
'4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	Kab. Tanjab Barat	542 stel	360,531,800	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	360,531,800	-	0.00%
'4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Staf Ahli	Kab. Tanjab Barat	3 Staf Ahli	330,795,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	330,795,000	-	0.00%
		Jumlah Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang di Jalankan		2 Aplikasi						
		Jumlah Waktu Fasilitasi Makanan dan Minuman Staf Ahli		12 Bulan						
'4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan/Pelatihan yang difasilitasi	Kab. Tanjab Barat	2 Orang	72,000,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	72,000,000	-	0.00%
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan layanan administrasi umum</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>4,107,033,734</b>	<b>Cakupan layanan administrasi umum</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>6,426,533,734</b>	<b>2,319,500,000</b>	<b>56.48%</b>

Bagian Umum

'4.01.01.2.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	287,563,865	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	302,563,865	15,000,000	5.22%
		Jumlah Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor		12 Bulan						
"4.01.01.2.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK) yang Tersedia	Kab. Tanjab Barat	11 Jenis/Item	497,285,257	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	497,285,257	-	0.00%
'4.01.01.2.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	Kab. Tanjab Barat	60 Jenis/Item	316,773,108	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1,116,773,108	800,000,000	252.55%
'4.01.01.2.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik (alat dan bahan pembersih/kebersihan) kantor	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	2,954,200,169	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,454,200,169	1,500,000,000	50.78%
		Jumlah Waktu Ketersediaan Makanan dan Minuman Kantor		12 Bulan						
'4.01.01.2.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak (Blangko, Formulir, Buku, Map) dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Tanjab Barat	7 Jenis/Item	51,211,335	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	55,711,335	4,500,000	8.79%
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>2,309,744,420</b>	<b>Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH</b>	<b>100%</b>	<b>11,123,112,913</b>	<b>8,813,368,493</b>	<b>381.57%</b>
'4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin yang tersedia	Kab. Tanjab Barat	45 Jenis/Item	2,309,744,420	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	11,123,112,913	8,813,368,493	381.57%
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>3,284,460,675</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3,364,460,675</b>	<b>80,000,000</b>	<b>2.44%</b>
'4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Pendistribusian dan Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Setda	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	447,025,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	447,025,000	-	0.00%
'4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Beban Pemakaian Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet/TV Berlangganan	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	1,867,500,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1,947,500,000	80,000,000	4.28%
		Jumlah Waktu Penyediaan Beban Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan		12 Bulan						
		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan						
'4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	336,725,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	336,725,000	-	0.00%

Bagian Umum

'4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	Kab. Tanjab Barat	45 Jenis/Item	633,210,675	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	633,210,675	-	0.00%		
		Jumlah Waktu Tersedianya Jasa Pelayanan Umum (Tenaga Kebersihan) Kantor		12 Bulan								
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Tanjab Barat	100%	4,845,608,750	Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	5,379,358,750	533,750,000	11.02%		
'4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Kab. Tanjab Barat	88 Unit	2,794,099,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	88 Unit	2,812,849,000	18,750,000	0.67%		
		Jumlah Waktu Jasa Pemeliharaan (Tenaga Supir) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		12 Bulan								
'4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	805,165,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	518 Unit	820,165,000	15,000,000	1.86%		
'4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara /Rehabilitasi	Kab. Tanjab Barat	1 Gedung	1,246,344,750	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	1,746,344,750	500,000,000	40.12%		
		Jumlah Rumah Dinas/Jabatan yang dipelihara/Rehabilitasi		3 Bangunan								
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang Tersedia	Kab. Tanjab Barat	100%	1,067,651,894	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang Tersedia	100%	1,067,651,894	-	0.00%		
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Daerah	Jumlah KDH/WKDH yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	Kab. Tanjab Barat	2 Orang	1,067,651,894	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1,067,651,894	-	0.00%		
4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjab Barat	29	466,097,178	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	29	466,097,178	-	0.00%		Bagian Organisasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80.66		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.66					
		Nilai AKIP Kabupaten		>61,50		Nilai AKIP Kabupaten	>61,50					



4.01.01.2. 13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah OPD yang Right Sizing	Kab. Tanjab Barat	3 OPD	101,774,307	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	101,774,307	-	0.00%	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
		Jumlah Peraturan Bupati terkait kelembagaan		3 Perbup							
		Jumlah Tersusunnya Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja		1 Dokumen							
		Jumlah Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan		1 Dokumen							
4.01.01.2. 13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Survey Kepuasan Masyarakat	Kab. Tanjab Barat	100%	145,234,507	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	145,234,507	-	0.00%	
		Jumlah Tersusunnya Laporan SOP		25 SOP							
		Jumlah regulasi kebijakan ketatalaksanaan		2 Regulasi							
		Data Pengaduan Pelayanan Publik Terpadu		1 Dokumen							
		Data Inovasi Daerah		1 Dokumen							
4.01.01.2. 13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	219,088,364	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	219,088,364	-	0.00%	
		Jumlah Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi kabupaten		1 Laporan							
<b>4.01.01.2.1 4</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi</b>	Kab. Tanjab Barat	<b>100%</b>	<b>2,169,614,024</b>	<b>Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi</b>	<b>100%</b>	<b>2,832,136,736</b>	<b>662,522,712</b>	<b>30.54%</b>	
4.01.01.2. 14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Frekuensi Kegiatan Pimpinan Daerah yang Dilakukan Secara Keprotokolan	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	276,319,800	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	302,919,800	26,600,000	9.63%	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Keprotokolan		1 Dokumen							
4.01.01.2. 14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Frekuensi Pengolahan Dokumen Laporan Kegiatan Pimpinan	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	487,350,000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	554,250,000	66,900,000	13.73%	
		Jumlah Bahan Bacaan Pimpinan dan Sekretariat Daerah		36000 Eksamplar							
4.01.01.2. 14.03	Pendokumentasi Tugas Pimpinanan	Frekuensi Pengolahan Data Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	1,405,944,224	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	1,974,966,936	569,022,712	40.47%	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Pendokumentasian		1 Dokumen							

4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase keterisian data IKK LPPD	Kab. Tanjab Barat	100%	13,871,812,758	Persentase keterisian data IKK LPPD	100%	14,321,812,758	450,000,000	3.24%	Bagian Tapem
4.01.02.2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Skorr LPPD	Kab. Tanjab Barat	3<ST<4	672,161,375	Skorr LPPD	3<ST<4	672,161,375	-	0.00%	
'4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	350,929,880	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	350,929,880	-	0.00%	
		Jumlah Laporan Standar Pelayanan Minimal		1 Laporan							
		Jumlah Pelaksanaan Event dalam rangka peningkatan nilai kebangsaan		10 Event (HUT RI & Hari Jadi Ka							
		Cakupan wilayah monitoring kesiapan tahapan Pemilu, Pilkada dan Pilpres		13 Kecamatan							
'4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Laporan Pembuatan nama Rupabumi	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	159,261,300	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	159,261,300	-	0.00%	
		Jumlah Tanda Batas Kabupaten		4 Tanda							
		Jumlah tanda batas Kecamatan		8 Tanda							
'4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah kecamatan yang dilakukan penilaian camat teladan	Kab. Tanjab Barat	13 Kecamatan	161,970,195	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	161,970,195	-	0.00%	
		Jumlah Rapat Koordinasi camat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat		1 Kali Rakor							
		Jumlah laporan pengawsan pelaksanaan PATEN		1 Laporan							
		Jumlah monitoring pelaksanaan perencanaan, penganggaran perbendaharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yg baik tingkat kelurahan		2 Laporan							
'4.01.02.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Kab. Tanjab Barat	100%	11,711,750,431	Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100%	12,161,750,431	450,000,000	3.84%	Bagian KESRA
'4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah cabang lomba musyabaqah tilawatil qur'an (MTQ) tingkat provinsi yang diikuti	Kab. Tanjab Barat	26 Cabang Lomba	7,883,511,528	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	7,883,511,528	-	0.00%	
		Jumlah pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Syiar Nilai-Nilai Keagamaan		9 Kali Peringatan Hari Besar							
		Jumlah pembinaan pengembangan tilawatil Qur'an yang dilaksanakan		3 Kali Pembinaan							
		Jumlah Tahapan Pelaksanaan Training Centre (TC) MTQ		5 Kali Tahapan							

'4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga yang difasilitasi, diverifikasi, dan dimonitoring, dievaluasi serta diberi rekomendasi terkait permohonan hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat sosial	Kab. Tanjab Barat	2 Lembaga / Badan	3,519,701,003	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	9 Dokumen	3,969,701,003	450,000,000	12.79%	
		Jumlah pembinaan Da'i Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat		134 Da'i Desa/Kel							
		Jumlah guru minggu yang diberikan intensif pembinaan		200 Orang							
		Jumlah guru agama, imam, mudim dan guru ngaji, khatib dan bilal yang diberi pembinaan		3545 Orang							
		Jumlah pelaksanaan festival anak sholeh tingkat kabupaten dan tingkat provinsi		2 Kali							
		Jumlah fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji dan pengiriman TKHD		2 kali fasilitasi							
'4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi serta pertemuan forum tim pembina UKS tingkat kabupaten	Kab. Tanjab Barat	2 Kali Rapat	308,537,900	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	308,537,900	-	0.00%	
		Jumlah penyelesaian proses pencatatan pernikahan bagi masyarakat		653 pasang							
		Jumlah pelaksanaan kegiatan amaliyah ramadhan dua hari raya di 13 kecamatan		5 Kali							
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<b>Persentase Produk Hukum Daerah yang dindangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</b>	Kab. Tanjab Barat	100%	859,301,175	<b>Persentase Produk Hukum Daerah yang dindangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</b>	100%	859,301,175	-	0.00%	Bagian Hukum
'4.01.02.2.03.01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Perda yang diundangkan	Kab. Tanjab Barat	12 Perda	325,876,460	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	4 Dokumen	325,876,460	-	0.00%	
		Jumlah Perbup yang diundangkan		50 Perbup							
		Jumlah SK yang diterbitkan		1000 SK							
'4.01.02.2.03.02	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah perkara yang ditangani	Kab. Tanjab Barat	3 Perkara	276,398,795	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	276,398,795	-	0.00%	
		Jumlah Laporan Aksi HAM		4 Lap. Aksi HAM							
		Jumlah Laporan Kadarkum		1 Laporan Kadarkum							
'4.01.02.2.03.03	Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Koordinasi dan konsultasi penetapan raperda (Harmonisasi)	Kab. Tanjab Barat	4 Kali	257,025,920	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	5 Dokumen	257,025,920	-	0.00%	
Jumlah Laporan SJDIDH	1 Laporan SJDIDH										
Jumlah perda dan himpunan perda Desa/Kel. Yang mendapatkan penyuluhan hukum	600 Buku Perda 12 Desa/Ke										

4.01.02.2.0 4	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang terfasilitasi	Kab. Tanjab Barat	100%	628,599,777	Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang terfasilitasi	100%	628,599,777	-	0.00%	Bagian Kerjasama
4.01.02.2.0 4.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen Kerjasama lembaga / perorangan dalam negeri yang difasilitasi	Kab. Tanjab Barat	67 Dok	274,973,399	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	3 Dokumen	274,973,399	-	0.00%	
4.01.02.2.0 04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah dokumen Kerjasama lembaga / perorangan luar negeri yang difasilitasi	Kab. Tanjab Barat	3 Dok	206,088,339	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 Dokumen	206,088,339	-	0.00%	
4.01.02.2.0 4.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi kerjasama yang difasilitasi	Kab. Tanjab Barat	70 Dokumen	147,538,039	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5 Laporan	147,538,039	-	0.00%	
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang di laksanakan	Kab. Tanjab Barat	100%	5,561,535,000	Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang di laksanakan	100%	5,692,485,400	130,950,400	2.35%	Bagian Perekonimian
4.01.03.2.0 1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi yang dilaksanakan	Kab. Tanjab Barat	100%	4,237,291,400	Persentase koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi yang dilaksanakan	100%	4,368,242,000	130,950,600	3.09%	
4.01.03.2.0 01.01	Koordinasi, Singkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang diberikan penyertaan modal (PT.BPR Tanggo Rajo, PT Tanjab Sakti, BPD)	Kab. Tanjab Barat	4 BUMD	4,083,888,800	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	4,107,129,000	23,240,200	0.57%	
		Jumlah BUMD yang diberikan Subsidi (PDAM Tirta Pengabuan)		1 BUMD							
		Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD)		1 laporan							
		Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BUMD dan BLUD		4 kali							
4.01.03.2.0 01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah monitoring dan evaluasi Pengendalian dan distribusi perekonomian daerah	Kab. Tanjab Barat	4 kali	83,888,800	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	150,009,000	66,120,200	78.82%	
		Jumlah laporan sembako		12 Laporan							
		Jumlah laporan TPID		4 Laporan							
4.01.03.2.0 01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah laporan KUPEM	Kab. Tanjab Barat	12 laporan	69,513,800	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	111,104,000	41,590,200	59.83%	
		Jumlah laporan Pupuk		4 laporan							
		Jumlah monitoring dan pembinaan KUPEM		4 kali							
		umlah monitoring penyaluran pupuk dan pestisida tepat sasaran		4 kali							

4.01.03.2.0 2	Kegiatan Administrasi Pembangunan	Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	Kab. Tanjab Barat	100%	301,438,400	Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	100%	301,438,200	(200)	0.00%	Bagian ADP	
		Cakupan evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah		45 OPD		Cakupan evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah						45 OPD
'4.01.03.2.02.01	Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Jumlah dokumen data pembangunan Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	121,935,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	121,935,000	-	0.00%		
		Frekuensi rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan di Kab. Tanjab Barat		12 Bulan								
'4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pelaporan hasil monitoring	Kab. Tanjab Barat	4 kali	28,740,000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	24,989,800	(3,750,200)	-13.05%		
'4.01.03.2.02.03	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah LPPK dan Rekap Program OPD	Kab. Tanjab Barat	12 Laporan	150,763,400	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	154,513,400	3,750,000	2.49%		
		Jumlah pelaporan laporan tepra sismontepra		12 Laporan								
4.01.03.2.0 3	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas	Kab. Tanjab Barat	100%	584,046,500	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas	100%	584,046,500	-	0.00%		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
'4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang ditender	Kab. Tanjab Barat	150 Paket	195,500,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	165 Dokumen	195,500,000	-	0.00%		
		Jumlah paket lelang yang dilaksanakan tepat waktu dan tuntas		150 Paket								
'4.01.03.2.03.02	'Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah OPD yang menyampaikan RUP tepat Waktu	Kab. Tanjab Barat	44 OPD	388,546,500	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44 Dokumen	388,546,500	-	0.00%		
		Jumlah pemeliharaan Co. Location		1 Co.Location								
		Jumlah server yang dilakukan Pengecekan dan servis berkala		2 Server								
'4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta sosialisasi	Kab. Tanjab Barat	84 Peserta	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	80 Orang	-	-	-		
		Jumlah peserta ujian sertifikasi PPBJ tingkat dasar		84 Peserta								

4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif	Kab. Tanjab Barat	80%	438,758,700	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif	80%	438,758,700	-	0.00%	Bagian SDA
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan monitoring bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, Kehutanan, dan Kelautan dan Perikanan	Kab. Tanjab Barat	13 kali	102,575,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	102,575,000	-	0.00%	
		Jumlah Dokumen Laporan evaluasi		1 Dokumen							
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring bidang Pertambangan dan lingkungan hidup	Kab. Tanjab Barat	5 kali	252,663,700	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	252,663,700	-	0.00%	
		Jumlah Laporan evaluasi		1 Laporan							
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring bidang Energi dan Air	Kab. Tanjab Barat	5 kali	83,520,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	83,520,000	-	0.00%	
		umlah Dokumen Laporan Evaluasi		1 Dokumen							
<b>Jumlah Total</b>					<b>64,830,534,013</b>			<b>79,820,625,618</b>	<b>14,990,091,605</b>	<b>23.12%</b>	

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisis terhadap Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 seluruh indikator kinerja dan satuan target kinerja dari sub kegiatan mengalami perubahan.

Adanya perubahan ini diakibatkan oleh penerapan dan implementasi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah. Implementasi dari Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 juga mengakibatkan perubahan/penambahan kebutuhan pagu anggaran pada beberapa sub kegiatan hal ini diakibatkan oleh perhitungan berdasarkan kebutuhan.

## **2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat**

Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dan kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi -asosiasi maupun dan unsur masyarakat lainnya yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dan penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah (PD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Agenda reformasi birokrasi yang mencakup 8 area perubahan yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, "mind set and culture" masih belum terlaksana dengan baik.
2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan.

Pada Program Pembinaan Nasional tercantum Visi Pembangunan Nasional yaitu ***“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Sementara itu Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang didasarkan pada Visi Pembangunan Nasional yang tercantum pada pola Dasar Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021–2026 adalah ***“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah” (Berdaya saing, Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)”***.



Adapun Makna yang terkandung dalam **Visi** tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- **Berkualitas** adalah Sumber daya manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.
- **Ekonomi maju** adalah meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- **Religius** adalah berlandaskan nilai – nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.
- **Kompetitif** adalah mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumber daya unggulan daerah.
- **Aman** adalah suasana aman dan tertib sehingga masyarakatnya aman dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.
- **Harmonis** adalah terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

Berdasarkan Misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diatas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggaris bawahi misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 pada point 3 (tiga) yaitu ***“Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik”***

Dari misi point 3 (Tiga) tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya untuk menjalankan Misi tersebut dengan baik, akan tetapi untuk menjalankan Misi tersebut tidaklah mudah, berbagai permasalahan dalam menjalankan program pasti ada.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya mewujudkan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 yaitu : **“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah” (Berdaya saing, Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)**”, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; dan
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022. Adapun Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas tatakelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggungjawab
2. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah daerah.

Sedangkan Sasaran adalah merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing. Dengan demikian sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan beberapa sasaran yang akan dicapai, antara lain sebagai berikut

1. Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah
2. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesejahteraan rakyat
3. Meningkatkan penataan produk hukum daerah
4. Meningkatkan Kerja Sama antar Daerah / Lembaga / Perseorangan Dalam Negeri & Luar Negeri
5. Meningkatkan administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah
6. Meningkatkan administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah
7. Meningkatkan Akses Informasi Pembangunan Daerah
8. Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan serta pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan kelembagaan yang efektif
10. Meningkatkan pelayanan Kehumasan dan keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah.

**Tabel : 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja**  
**Rancangan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2022**

Visi Kepala Daerah	Misi ke-3	Tujuan Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab
Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah” (Berdaya saing, (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan public	1. Meningkatkan Kualitas tatakelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggungjawab	1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan serta pelayanan publik pada Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	- Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	100%	Bag. Renkeu
				- Nilai/Katagori SAKIP Perangkat Daerah	>62,55 (B)	
				- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80,70	Bag. Umum
				- Cakupan pelayanan administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat	100%	
				- Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH	100%	

			1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan kelembagaan yang efektif	- Nilai Kematangan Perangkat Daerah	29	Bag. Organisasi		
				- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	80.66			
				- Nilai AKIP Kabupaten	>61,50 (B)			
					1.3. Meningkatkan pelayanan Kehumasan dan keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah	- Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi	100%	Bag. Protokoler
		2. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah daerah	2.1	Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah	- Persentase keterisian data IKK LPPD	100%	Bag. Tapem	
					- Skor LPPD	3<ST<4		
			2.2.	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesejahteraan rakyat	- Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100%	Bag. Kesra	
			2.3.	Meningkatnya penataan produk hukum daerah	- Persentase Produk Hukum Daerah yang Di undangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	100%	Bag. Hukum	

			2.4. Meningkatnya Kerja Sama antar Daerah / Lembaga / Perseorangan Dalam Negeri & Luar Negeri	- Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang Terfasilitasi	100%	Bag. Kerjasama
			2.5. Meningkatnya administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah	- Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang di laksanakan	100%	Bag. Perekonomian
			2.6. Meningkatnya Akses Informasi Pembangunan Daerah	- Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	100%	Bag. ADP
				- Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas dan tepat waktu	100%	Bag. PBJ
			2.7. Meningkatnya koordinasi dan Pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif	- Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif	100%	Bag. SDA

### 3.3. Program Dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan serta sub kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya APBN dan atau daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi beberapa atau kesemua sumber daya tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708/2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Sekretariat Daerah dengan 3 (Tiga) Program diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan
3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Renja Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 12 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan rincian 4 kegiatan dan 7 sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 6 Kegiatan dan 17 sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Umum, 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dibawah kendali Bagian Organisasi, serta 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dipertanggung jawabkan bagian Peotokoler Pimpinan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan rincian 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dikerjakan oleh Bagian Tata Pemerintahan, 1 kegiatan 3 sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan 1 kegiatan 3 sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Hukum, serta 1 kegiatan 3 sub kegiatan oleh Bagian Kerjasama.

Program Perekonomian dan Pembangunan dilaksanakan oleh 4 Bagian di lingkup Sekretariat Daerah yaitu Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Sumber Daya Alam yang masing-masing melaksanakan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan.

Adapun rincian program dan kegiatan serta sub kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.3.1 berikut :



**Tabel 3.3.1**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022**

Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah Setda	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan tersusun berkualitas dan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

				Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan</b>	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH</b>	<b>Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang Tersedia</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		
				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>Persentase BMD terkelola dengan baik</b>	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
	<b>Cakupan pelayanan administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat kehadiran pegawai / ASN</b>	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	<b>Bagian Umum</b>	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Setda)</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan layanan administrasi umum</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	<b>Bagian Umum</b>
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH</b>	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	

		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
		<b>Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang Tersedia</b>	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan					
<b>Nilai AKIP Kabupaten</b>	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	<b>Nilai Kematangan Perangkat Daerah</b>	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	<b>Bagian Organisasi</b>	
			<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
			<b>Nilai AKIP Kabupaten</b>	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
<b>Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi</b>	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	<b>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		
			Pendokumentasi Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		

<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase keterisian data IKK LPPD</b>	<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Skorr LPPD</b>	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	<b>Bagian Tapem</b>
				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
	<b>Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat</b>	<b>Capaian Prestasi MTQ tingkat Provinsi</b>	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	<b>Bagian KESRA</b>
				Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	
				Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	

	<b>Persentase Produk Hukum Daerah yang ditudingkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase Produk Hukum Daerah yang ditudingkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</b>	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	<b>Bagian Hukum</b>
				Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	
				Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	
	<b>Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang terfasilitasi</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Jumlah kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang terfasilitasi</b>	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	<b>Bagian Kerjasama</b>
				Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang di laksanakan</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi yang dilaksanakan</b>	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	<b>Bagian Perekonomian</b>
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	

	<b>Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah</b>	<b>Kegiatan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah</b>	Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	<b>Bagian Adm.Pembangunan</b>
				Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
				Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
	<b>Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Jumlah Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan dengan tuntas</b>	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
	<b>Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif</b>	<b>Kegiatan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Jumlah Kebijakan dan Fasilitasi Urusan Sumber Daya Alam yang Terlaksana dengan efektif</b>	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	<b>Bagian Sumber Daya Alam</b>
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	

Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan, disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan kebutuhan anggaran tiga bulan terakhir dari pelaksanaan renja sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 32 ayat (1) menyebutkan "Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dan RPJMD menggunakan bahan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah". Oleh karena itu Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan bentuk matrik yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan, sub kegiatan, beserta indikator kinerja, target, pagu untuk tahun 2022 dan perkiraan kebutuhan anggaran sampai akhir tahun 2022 beserta sumber dana kegiatan, sebagai berikut :



**Tabel : Rancangan Perubahan Renja 2022**  
**Rumusan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2022**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program,Kegiatan,Subkegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022 sebelum perubahan					Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2022 setelah perubahan			Rencana Kerja Bertambah/Berkurang		Penanggung jawab	
		Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Rp.	%		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	Kab. Tanjab Barat	100%	26,383,648,780	APBD		Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	100%	28,383,648,780	2,000,000,000	7.58%	Bagian Renkenu	
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan,Pengaggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	Kab. Tanjab Barat	100%	164,261,000	APBD		Persentase dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	100%	164,261,000	-	0.00%		
		Nilai AKIP Perangkat Daerah Setda	Kab. Tanjab Barat	62,55 (B)				Nilai AKIP Perangkat Daerah Setda	62,55 (B)					
'4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Bagian Setda yang diselaraskan	Kab. Tanjab Barat	10 Dokumen	164,261,000	APBD		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	164,261,000	-	0.00%		
		Jumlah dokumen perencanaan setda yang disusun sesuai dengan aturan dan tepat waktu		10 Dokumen										
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan tersusun berkualitas dan tepat waktu	Kab. Tanjab Barat	100%	19,646,158,180	APBD		Persentase dokumen keuangan tersusun berkualitas dan tepat waktu	100%	19,646,158,180	-	0.00%		
'4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	18,297,088,180	APBD		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang/Bulan	18,297,088,180	-	0.00%		
'4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dibayarkan honorarium	Kab. Tanjab Barat	63 Orang	1,090,920,000	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,090,920,000	-	0.00%		
'4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan hasil pengujian / verifikasi keuangan OPD	Kab. Tanjab Barat	2 laporan	169,250,000	APBD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	169,250,000	-	0.00%		
		Jumlah dokumen laporan keuangan		2 Dokumen										
'4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	88,900,000	APBD		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	88,900,000	-	0.00%		
		Jumlah dokumen pelaporan setda		4 Dokumen										

4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan		100%	6,415,979,600	100%		Persentase Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	100%	8,415,979,600	2,000,000,000	31.17%	Bagian Umum
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah waktu rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	6,415,979,600	APBD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8,415,979,600	2,000,000,000	31.17%	
4.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Persentase BMD dikelola dengan baik	Kab. Tanjab Barat	100%	157,250,000	APBD		Persentase BMD dikelola dengan baik	100%	157,250,000	-	0.00%	
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD OPD yang dikelola	Kab. Tanjab Barat	1137 BMD	157,250,000	APBD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	157,250,000	-	0.00%	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	Cakupan pelayanan administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat	Kab. Tanjab Barat	100%	16,377,826,273	APBD		Cakupan pelayanan administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat	100%	28,124,444,766	11,746,618,493		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Setda)	Kab. Tanjab Barat	80,70			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Setda)	80,70					
4.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kehadiran pegawai / ASN	Kab. Tanjab Barat	100%	763,326,800	APBD		Tingkat kehadiran pegawai / ASN	100%	763,326,800	-	0.00%	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	Kab. Tanjab Barat	542 stel	360,531,800	APBD		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	360,531,800	-	0.00%	
4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Staf Ahli	Kab. Tanjab Barat	3 Staf Ahli	330,795,000	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	330,795,000	-	0.00%	
		Jumlah Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang di Jalankan		2 Aplikasi									
		Jumlah Waktu Fasilitasi Makanan dan Minuman Staf Ahli		12 Bulan									
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan/Pelatihan yang difasilitasi	Kab. Tanjab Barat	2 Orang	72,000,000	APBD		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	72,000,000	-	0.00%	
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	4,107,033,734	APBD		Cakupan layanan administrasi umum	12 Bulan	6,426,533,734	2,319,500,000	56.48%	
4.01.01.2.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	287,563,865	APBD		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	302,563,865	15,000,000	5.22%	
		Jumlah Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor		12 Bulan									

"4.01.01.2.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK) yang Tersedia	Kab. Tanjab Barat	11 Jenis/Item	497,285,257	APBD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	497,285,257	-	0.00%
4.01.01.2.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	Kab. Tanjab Barat	60 Jenis/Item	316,773,108	APBD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1,116,773,108	800,000,000	252.55%
4.01.01.2.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik (alat dan bahan pembersih/kebersihan) kantor	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	2,954,200,169	APBD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,454,200,169	1,500,000,000	50.78%
		Jumlah Waktu Ketersediaan Makanan dan Minuman Kantor		12 Bulan							
4.01.01.2.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak (Blangko, Formulir, Buku, Map) dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Tanjab Barat	7 Jenis/Item	51,211,335	APBD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	55,711,335	4,500,000	8.79%
4.01.01.2.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>2,309,744,420</b>	<b>APBD</b>	<b>Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH</b>	<b>100%</b>	<b>11,123,112,913</b>	<b>8,813,368,493</b>	<b>381.57%</b>
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin yang tersedia	Kab. Tanjab Barat	45 Jenis/Item	2,309,744,420	APBD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	11,123,112,913	8,813,368,493	381.57%
4.01.01.2.08	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>3,284,460,675</b>	<b>APBD</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3,364,460,675</b>	<b>80,000,000</b>	<b>2.44%</b>
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Pendistribusian dan Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Setda	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	447,025,000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	447,025,000	-	0.00%
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Beban Pemakaian Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet/TV Berlangganan	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	1,867,500,000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1,947,500,000	80,000,000	4.28%
		Jumlah Waktu Penyediaan Beban Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan		12 Bulan							
		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan							
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	336,725,000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	336,725,000	-	0.00%
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	Kab. Tanjab Barat	45 Jenis/Item	633,210,675	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	633,210,675	-	0.00%
		Jumlah Waktu Tersedianya Jasa Pelayanan Umum (Tenaga Kebersihan) Kantor		12 Bulan							

Bagian Umum

4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Tanjab Barat	100%	4,845,608,750	APBD		Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	5,379,358,750	533,750,000	11.02%	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Kab. Tanjab Barat	88 Unit	2,794,099,000	APBD		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	88 Unit	2,812,849,000	18,750,000	0.67%	
		Jumlah Waktu Jasa Pemeliharaan (Tenaga Supir) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		12 Bulan									
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	805,165,000	APBD		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	518 Unit	820,165,000	15,000,000	1.86%	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara /Rehabilitasi	Kab. Tanjab Barat	1 Gedung	1,246,344,750	APBD		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	1,746,344,750	500,000,000	40.12%	
		Jumlah Rumah Dinas/Jabatan yang dipelihara/Rehabilitasi		3 Bangunan									
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang Tersedia	Kab. Tanjab Barat	100%	1,067,651,894	APBD		Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang Tersedia	100%	1,067,651,894	-	0.00%	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Daerah	Jumlah KDH/WKDH yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	Kab. Tanjab Barat	2 Orang	1,067,651,894	APBD		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1,067,651,894	-	0.00%	
4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjab Barat	29	466,097,178	APBD		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	29	466,097,178	-	0.00%	Bagian Organisasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80.66				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.66				
		Nilai AKIP Kabupaten		>61,50				Nilai AKIP Kabupaten	>61,50				
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah OPD yang Right Sizing	Kab. Tanjab Barat	3 OPD	101,774,307	APBD		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	101,774,307	-	0.00%	
		Jumlah Peraturan Bupati terkait kelembagaan		3 Perbup									
		Jumlah Tersusunnya Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja		1 Dokumen									
		Jumlah Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan		1 Dokumen									

4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Survey Kepuasan Masyarakat	Kab. Tanjab Barat	100%	145,234,507	APBD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	145,234,507	-	0.00%	
		Jumlah Tersusunnya Laporan SOP		25 SOP								
		Jumlah regulasi kebijakan ketatalaksanaan		2 Regulasi								
		Data Pengaduan Pelayanan Publik Terpadu		1 Dokumen								
		Data Inovasi Daerah		1 Dokumen								
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	219,088,364	APBD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	219,088,364	-	0.00%	
		Jumlah Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi kabupaten		1 Laporan								
4.01.01.2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi	Kab. Tanjab Barat	100%	2,169,614,024	APBD	Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi	100%	2,832,136,736	662,522,712	30.54%	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Frekuensi Kegiatan Pimpinan Daerah yang Dilakukan Secara Keprotokolan	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	276,319,800	APBD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	302,919,800	26,600,000	9.63%	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Keprotokolan		1 Dokumen								
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Frekuensi Pengolahan Dokumen Laporan Kegiatan Pimpinan	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	487,350,000	APBD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	554,250,000	66,900,000	13.73%	
		Jumlah Bahan Bacaan Pimpinan dan Sekretariat Daerah		36000 Eksamplar								
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasi Tugas Pimpinanan	Frekuensi Pengolahan Data Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	1,405,944,224	APBD	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	1,974,966,936	569,022,712	40.47%	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Pendokumentasian		1 Dokumen								
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase keterisian data IKK LPPD	Kab. Tanjab Barat	100%	13,871,812,758	APBD	Persentase keterisian data IKK LPPD	100%	14,321,812,758	450,000,000	3.24%	Bagian Tapem
4.01.02.2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Skorr LPPD	Kab. Tanjab Barat	3<ST<4	672,161,375	APBD	Skorr LPPD	3<ST<4	672,161,375	-	0.00%	

'4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	350,929,880	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	350,929,880	-	0.00%	
		Jumlah Laporan Standar Pelayanan Minimal		1 Laporan								
		Jumlah Pelaksanaan Event dalam rangka peningkatan nilai kebangsaan		10 Event (HUT RI & Hari Jadi Ka)								
		Cakupan wilayah monitoring kesiapan tahapan Pemilu, Pilkada dan Pilpres		13 Kecamatan								
'4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Laporan Pembuatan nama Rupabumi	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	159,261,300	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	159,261,300	-	0.00%	
		Jumlah Tanda Batas Kabupaten		4 Tanda								
		Jumlah tanda batas Kecamatan		8 Tanda								
'4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah kecamatan yang dilakukan penilaian camat teladan	Kab. Tanjab Barat	13 Kecamatan	161,970,195	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	161,970,195	-	0.00%	
		Jumlah Rapat Koordinasi camat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat		1 Kali Rakor								
		Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan PATEN		1 Laporan								
		Jumlah monitoring pelaksanaan perencanaan, penganggaran perbendaharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yg baik tingkat kelurahan		2 Laporan								
'4.01.02.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Kab. Tanjab Barat	100%	11,711,750,431	APBD	Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100%	12,161,750,431	450,000,000	3.84%	Bagian KESRA
'4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah cabang lomba musyabaqah tilawatil qur'an (MTQ) tingkat provinsi yang diikuti	Kab. Tanjab Barat	26 Cabang Lomba	7,883,511,528	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	7,883,511,528	-	0.00%	
		Jumlah pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Syiar Nilai-Nilai Keagamaan		9 Kali Peringatan Hari Besar								
		Jumlah pembinaan pengembangan tilawatil Qur'an yang dilaksanakan		3 Kali Pembinaan								
		Jumlah Tahapan Pelaksanaan Training Centre (TC) MTQ		5 Kali Tahapan								

'4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga yang difasilitasi, diverifikasi, dan dimonitoring, dievaluasi serta diberi rekomendasi terkait permohonan hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat sosial	Kab. Tanjab Barat	2 Lembaga / Badan	3,519,701,003	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	9 Dokumen	3,969,701,003	450,000,000	12.79%	
		Jumlah pembinaan Da'i Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat		134 Da'i Desa/Kel								
		Jumlah guru minggu yang diberikan intensif pembinaan		200 Orang								
		Jumlah guru agama, imam, mudim dan guru ngaji, khatib dan bilal yang diberi pembinaan		3545 Orang								
		Jumlah pelaksanaan festival anak sholeh tingkat kabupaten dan tingkat provinsi		2 Kali								
		Jumlah fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji dan pengiriman TKHD		2 kali fasilitasi								
'4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi serta pertemuan forum tim pembina UKS tingkat kabupaten	Kab. Tanjab Barat	2 Kali Rapat	308,537,900	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	308,537,900	-	0.00%	Bagian KESRA
		Jumlah penyelesaian proses pencatatan pernikahan bagi masyarakat		653 pasang								
		Jumlah pelaksanaan kegiatan amaliya ramadhan dua hari raya di 13 kecamatan		5 Kali								
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<b>Persentase Produk Hukum Daerah yang dituding tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</b>	Kab. Tanjab Barat	100%	859,301,175	APBD	<b>Persentase Produk Hukum Daerah yang dituding tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</b>	100%	859,301,175	-	0.00%	Bagian Hukum
'4.01.02.2.03.01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Perda yang diundangkan	Kab. Tanjab Barat	12 Perda	325,876,460	APBD	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	4 Dokumen	325,876,460	-	0.00%	
		Jumlah Perbup yang diundangkan		50 Perbup								
		Jumlah SK yang diterbitkan		1000 SK								
'4.01.02.2.03.02	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah perkara yang ditangani	Kab. Tanjab Barat	3 Perkara	276,398,795	APBD	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	276,398,795	-	0.00%	
		Jumlah Laporan Aksi HAM		4 Lap. Aksi HAM								
		Jumlah Laporan Kadarkum		1 Laporan Kadarkum								

4.01.02.2.03.03	Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Koordinasi dan konsultasi penetapan raperda (Harmonisasi)	Kab. Tanjab Barat	4 Kali	257,025,920	APBD	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	5 Dokumen	257,025,920	-	0.00%	
		Jumlah Laporan SJDH		1 Laporan SJDH								
		Jumlah perda dan himpunan perda Desa/Kel. Yang mendapatkan penyuluhan hukum		600 Buku Perda 12 Desa/Ke								
4.01.02.2.04	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang terfasilitasi	Kab. Tanjab Barat	100%	628,599,777	APBD	Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang terfasilitasi	100%	628,599,777	-	0.00%	Bagian Kerjasama
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen Kerjasama lembaga / perorangan dalam negeri yang difasilitasi	Kab. Tanjab Barat	67 Dok	274,973,399	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	3 Dokumen	274,973,399	-	0.00%	
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah dokumen Kerjasama lembaga / perorangan luar negeri yang difasilitasi	Kab. Tanjab Barat	3 Dok	206,088,339	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 Dokumen	206,088,339	-	0.00%	
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi kerjasama yang difasilitasi	Kab. Tanjab Barat	70 Dokumen	147,538,039	APBD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5 Laporan	147,538,039	-	0.00%	
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang di laksanakan	Kab. Tanjab Barat	100%	5,561,535,000	APBD	Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang di laksanakan	100%	5,692,485,400	130,950,400	2.35%	
4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi yang dilaksanakan	Kab. Tanjab Barat	100%	4,237,291,400	APBD	Persentase koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi yang dilaksanakan	100%	4,368,242,000	130,950,600	3.09%	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang diberikan penyertaan modal (PT.BPR Tanggo Rajo, PT Tanjab Sakti, BPD)	Kab. Tanjab Barat	4 BUMD	4,083,888,800	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	4,107,129,000	23,240,200	0.57%	
		Jumlah BUMD yang diberikan Subsidi (PDAM Tirta Pengabuan)		1 BUMD								
		Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD)		1 laporan								
		Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BUMD dan BLUD		4 kali								
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah monitoring dan evaluasi Pengendalian dan distribusi perekonomian daerah	Kab. Tanjab Barat	4 kali	83,888,800	APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	150,009,000	66,120,200	78.82%	
		Jumlah laporan sembako		12 Laporan								
		Jumlah laporan TPID		4 Laporan								



4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah laporan KUPEM	Kab. Tanjab Barat	12 laporan	69,513,800	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	111,104,000	41,590,200	59.83%	
		Jumlah laporan Pupuk		4 laporan								
		Jumlah monitoring dan pembinaan KUPEM		4 kali								
		umlah monitoring penyaluran pupuk dan pestisida tepat sasaran		4 kali								
4.01.03.2.02	Kegiatan Administrasi Pembangunan	Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	Kab. Tanjab Barat	100%	301,438,400	APBD	Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	100%	301,438,200	(200)	0.00%	
		Cakupan evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah		45 OPD								
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Jumlah dokumen data pembangunan Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	121,935,000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	121,935,000	-	0.00%	Bagian ADP
		Frekuensi rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan di Kab. Tanjab Barat		12 Bulan								
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pelaporan hasil monitoring	Kab. Tanjab Barat	4 kali	28,740,000	APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	24,989,800	(3,750,200)	-13.05%	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah LPPK dan Rekap Program OPD	Kab. Tanjab Barat	12 Laporan	150,763,400	APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	154,513,400	3,750,000	2.49%	
		Jumlah pelaporan laporan tepra sismontepra		12 Laporan								
4.01.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas	Kab. Tanjab Barat	100%	584,046,500	APBD	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas	100%	584,046,500	-	0.00%	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang ditender	Kab. Tanjab Barat	150 Paket	195,500,000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	165 Dokumen	195,500,000	-	0.00%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Jumlah paket lelang yang dilaksanakan tepat waktu dan tuntas		150 Paket								
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah OPD yang menyampaikan RUP tepat Waktu	Kab. Tanjab Barat	44 OPD	388,546,500	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44 Dokumen	388,546,500	-	0.00%	
		Jumlah pemeliharaan Co. Location		1 Co.Location								
		Jumlah server yang dilakukan Pengecekan dan servis berkala		2 Server								

4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta sosialisasi	Kab. Tanjab Barat	84 Peserta	-	APBD		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	80 Orang	-	-		
		Jumlah peserta ujian sertifikasi PPBJ tingkat dasar		84 Peserta									
4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif	Kab. Tanjab Barat	80%	438,758,700	APBD		Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif	80%	438,758,700	-	0.00%	Bagian SDA
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan monitoring bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, Kehutanan, dan Kelautan dan Perikanan	Kab. Tanjab Barat	13 kali	102,575,000	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	102,575,000	-	0.00%	
		Jumlah Dokumen Laporan evaluasi		1 Dokumen									
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring bidang Pertambangan dan lingkungan hidup	Kab. Tanjab Barat	5 kali	252,663,700	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	252,663,700	-	0.00%	
		Jumlah Laporan evaluasi		1 Laporan									
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring bidang Energi dan Air	Kab. Tanjab Barat	5 kali	83,520,000	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	83,520,000	-	0.00%	
		Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi		1 Dokumen									
<b>Jumlah Total</b>					<b>64,830,534,013</b>					<b>79,820,625,618</b>	<b>14,990,091,605</b>	<b>23.12%</b>	

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa seluruh sub kegiatan mengalami perubahan pada indikator kinerja dan satuan target indikator kinerja yang diakibatkan oleh implementasi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan perubahan anggaran berdasarkan perhitungan akan kebutuhan anggaran pada akhir tahun pelaksanaan renja tahun 2022 . adapun program yang membutuhkan tambahan anggaran sebagaimana tabel diatas yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota merupakan program rutin atau non urusan yang semula memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 45.397.186.255 setelah perubahan maka kebutuhan anggaran diperkirakan sebesar Rp. 59.143.804.748,- atau bertambah sekitar 30,28%. Program ini dilaksanakan oleh 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan
2. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat merupakan urusan Sekretariat Daerah yang terdiri dari 4 (Empat) kegiatan dan 12 (Dua Belas) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum dan Bagian Kerjasama, program ini mengalami perubahan/tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- atau 3,24% dari total pagu anggaran program.
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan juga merupakan urusan Sekretariat Daerah yang terdiri 4 (Empat) kegiatan dan 12 (Dua Belas) sub kegiatan, dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Bagian Sumber Daya Alam pada sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program ini mengalami perubahan pagu anggaran dari Rp. 5.561.535.000,- menjadi Rp. 5.692.485.400,- ada penambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 130.950.400,- atau 2,35% dari pagu anggaran program.

## BAB IV PENUTUP

### 1.1 CATATAN PENTING

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama ini di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tupoksi, tidak mengalami kendala yang berarti. Permasalahan yang dihadapi hanya karena keterbatasan pagu anggaran yang tersedia setiap tahunnya yang membuat beberapa program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan seoptimal mungkin untuk menunjang Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Keterbatasan anggaran yang tersedia tersebut mengharuskan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat membuat skala prioritas dalam melaksanakan seluruh kegiatan.

### 1.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rancangan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 disusun dengan mengacu kepada RJPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan memperhatikan isu-isu strategis yang ada pada setiap bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rancangan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat digunakan untuk menyempurnakan dan membiayai kegiatan yang belum terakomodir pada anggaran murni tahun anggaran 2022, sebagai acuan penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan untuk tahun anggaran 2022. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Rancangan Renja Perubahan ini merupakan penjabaran visi, misi, dan tujuan yang akan diambil disertai dengan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan sehingga merupakan salah satu dasar untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### 1.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rancangan Renja Perubahan Tahun Anggaran 2022. Dalam kaitan itu, diharapkan DPRD bersama masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2022 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak.

Demikian Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 yang telah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah dan masing-masing Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan Staf pelaksana selama 3 (Tiga) bulan terakhir tahun 2022 dan semoga bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan, Terima kasih.

Kuala Tungkal, Juni 2022

